

LAPORAN KEPATUHAN LHKAN 2025: DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN MENCAPAI 100%



WAJIB LHKPN

(Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara)



Pegawai/pejabat
diwajibkan melapor secara
khusus melalui sistem
LHKPN (100% tuntas)

518

TOTAL APARATUR NEGARA

Jumlah total wajib lapor tahun 2025 tersebar
di Sekretariat, 4 Direktorat teknis, dan 4 Unit
Pelaksana Teknis (UPT)

TIDAK WAJIB LHKPN

(Pelaporan via SPT Tahunan/Coretax)



483

Pegawai menyampaikan
informasi harta kekayaan
melalui SPT Tahunan/Coretax
DJP (status lapor 100%)

SEBARAN UNIT KERJA DAN PUSAT

UNIT KERJA PUSAT

Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan



UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DAERAH

✓ BPK Pontianak

✓ Kontribusi pelaporan
mencapai target 100%

✓ BPK Denpasar

✓ Kontribusi
Pelaporan
Mencapai
target 100%

✓ BPK Kupang

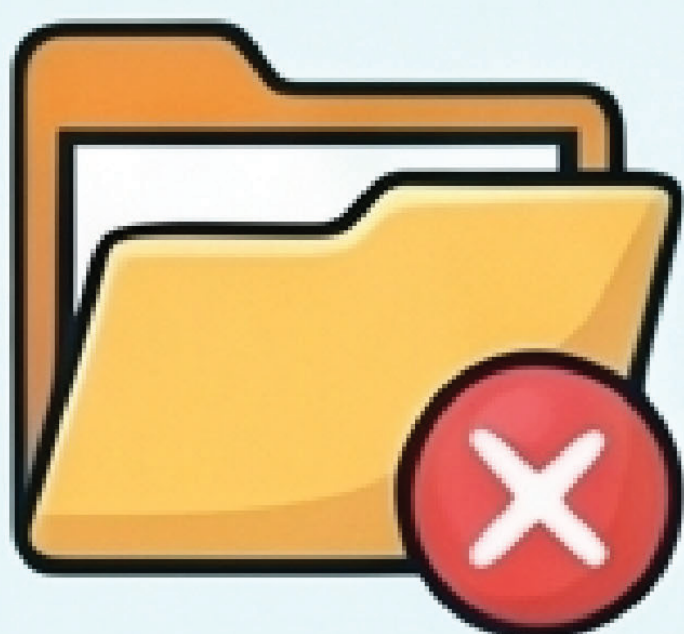
✓ Kontribusi
pelaporan
mencapai target
100%

✓ LPK Pekanbaru

✓ Kontribusi
pelaporan
mencapai target
100%

Unit Kerja	Wajib LHKPN	Tidak Wajib LHKPN	Total
Sekretariat	5	48	53
Direktorat Konservasi Ekosistem	1	28	29
Direktorat Konservasi Spesies & Genetik	1	32	33
Direktorat Pesisir & Pulau-Pulau Kecil	1	52	53
Direktorat Jasa Bahari	1	32	33
Direktorat Sumber Daya Kelautan	1	42	43
BPK Pontianak	6	53	59
BPK Denpasar	7	72	79
BPK Kupang	6	54	60
LPK Pekanbaru	6	70	76

STATUS AKHIR KEPATUHAN



0 PEGAWAI BELUM MELAPOR

Konsistensi penyelesaian laporan di seluruh lini memastikan tidak
ada tunggakan kewajiban LHKAN pada tahun 2025